



Surabaya, 6 Juli 2023

## SEMINAR NASIONAL HASIL RISET DAN PENGABDIAN

"Peran Riset, Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Pembangunan Indonesia Berkelanjutan"



# MAMPU MENGURAIKAN PARADIGMA BARU PEMBELAJARAN PKN DENGAN SIKAP BERTANGGUNG JAWAB DAN MANDIRI

Lutfiyatul Kamaliah<sup>1</sup>, Widia Ayu Kusnul K<sup>2</sup>, Daffa Al Sadad<sup>3</sup>, Nadya Nafisha A.S<sup>4</sup>

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya  
Indonesia

Email: [ndyanaff02@gmail.com](mailto:ndyanaff02@gmail.com)

### Abstrak

Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang sekolah dasar di Indonesia. Yang dimaksud dengan paradigma dalam modul ini adalah kerangka pikir yang dibangun sebagai landasan dalam mengembangkan dan memberi bentuk konseptual baru PKN. Misi PKN dengan paradigma barunya adalah mengembangkan pendidikan demokrasi yang secara psiko-pedagogis dan sosio-andragogis berfungsi mengembangkan tiga karakteristik pokok warga negara yang demokratis, yakni civic intelligence atau kecerdasan warga negara, civic responsibility atau tanggung jawab warga negara dan civic participation atau partisipasi warga negara. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah pendidikan yang mengarahkan siswa untuk menjadi warga negara yang demokratis, yang menghargai perbedaan, dan mencintai keadilan dan kebenaran (Ananda 2012). Teknik analisis data dilakukan dari awal berupa pengumpulan, catatan, dan klasifikasi. Hasil penelitian menunjukkan 1) metode berbasis portofolio merupakan sesi yang penting dalam project based learning untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa, 2) setelah implementasi metode berbasis portofolio, pemahaman mahasiswa tentang paradigma baru PKN SD berada pada level transformasi. Penelitian merekomendasikan agar metode berbasis portofolio dapat diterapkan dalam proses perkuliahan untuk mata kuliah PKN SD.

**Kata kunci :** Portofolio, Paradigma, PKN

Copyright © (2022) Seminar Hasil Riset dan Pengabdian ke 4

## PENDAHULUAN

### A. Menguraikan Paradigma Baru Pembelajaran PKN

Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Keprihatinan terhadap kondisi pendidikan kewarganegaraan semasa Orde Baru telah melahirkan sejumlah inisiatif untuk melakukan pembaharuan. Seiring proses reformasi, muncul gagasan pendidikan kewarganegaraan paradigma baru sebagai pendidikan demokrasi (Winataputra, 2012:83).

Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Sejalan dengan paradigma tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan yang hingga sekarang masih berlabel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) mempunyai misi yang lebih khas. Sosok Pendidikan Kewarganegaraan (Clvic atau Citizenship) yang demikian memang sering muncul di sejumlah negara, khususnya negar+negara berkembang, sesuai dengan laporan penelitian Cogan (1998) yang dikutip oleh Ace Suryadidan Somardi (2000: 1) yang mengatakan, *"citizenship education has often reflected the interest of those in power in particultular society and thus has been a matter of indoctrination and the establishment pf ideological hegmony rather than education"*. Kurikulum kewarganegaraan harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai- nilai baik dalam dan keluar sekolah. Oleh karena itu, kurikulum di sekolah harus komprehensif dan terpadu dalam hubungan dengan komunitas, sekolah dan masyarakat (Doganay, 2012: 37). Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang sekolah dasar di Indonesia.

Berdasar kenyataan tersebut tidak aneh jika kemudian muncul penilaian bahwa mata pelajaran ini bersifat politis dari pada akademb, lemah landasan keilmuannya, tidak tampak sosok keilmiahannya dan lain lain. Akibatnya lebih lanjut, mata pelajaran ini kurang menantang, sehingga kurang diminati oleh siswa. Paradigma baru PKN merupakan cara berpikir baru tentang PKN, bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas dan cara berfikir dan kualitas rasa serta kepekaan peserta didik dalam rangka memperbaiki, mengetahui, menghayati, juga sebuah upaya untuk mewujudkan nilai-nilai kehidupan khususnya nilai- nilai pancasila (Wahana and Mayasari 2007).

Thomas Kuhn (1962, 1996) memperkenalkan konsep "paradigma" untuk menjelaskan revolusi struktur pengetahuan, dari pengetahuan normal ke pencarian pengetahuan baru melalui langkah-langkah anomaly (penyimpangan). Ruang lingkup dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah (SD, SMP,SMA, dan SMK) meliputi: 1. Pancasila, sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi nasional Indonesia serta etika dalam pergaulan Internasional. 2. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum

dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 3. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud komitmen keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang utuh dan kohesif secara nasional dan harmonis dalam pergaulan antarbangsa 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bentuk final Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran di persekolahan perlu menyesuaikan diri sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat guna menuju masyarakat madani (civil society). Bangsa Indonesia yang saat ini tengah mengalami suatu perubahan diharapkan bergerak ke arah pendewasaan hingga terbentuknya masyarakat yang betul-betul demokratis, religius, beradab, bersatu, dan berkeadilan sosial sesuai dengan konsep, nilai, norma dan moralitas yang tersurat dan tersirat dalam Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan kewarganegaraan memiliki tugas untuk mempersiapkan para peserta didik menjadi warga negara yang cerdas dan baik (be good and smart citizen). Warga negara yang dimaksud adalah warga negara yang menguasai pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), mengartikulasikan keterampilan/kecakapan kewarganegaraan (civic skills), dan memiliki karakter kewarganegaraan (civic dispositions). Bagi bangsa Indonesia ukuran warga negara yang baik tentunya sangat dipengaruhi oleh ideologi nasional yaitu Pancasila, dimana Pancasila memiliki fungsi sebagai acuan/landasan/dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan kewarganegaraan saat ini perlu merevitalisasi pembangunan karakter bangsa yang sejak Proklamasi Kemerdekaan RI mejadi prioritas, agar sesuai dengan arah dan pesan konstitusi negara RI. Proses pembangunan karakter bangsa (national character building) diharapkan mengarah pada penciptaan suatu masyarakat Indonesia yang mampu menempatkan demokrasi dalam kehidupan bangsa dan negara sebagai titik sentral. Lalu bagaimana Kerangka Pedagogik Pendidikan Kewarganegaraan? Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah dilakukan melalui penerapan berbagai pembelajaran inovatif, kreatif, dan kontekstual sebagai wahana pembentukan karakter peserta didik secara utuh. Pengalaman belajar diseleksi dan diorganisasikan dengan menggunakan antara lain: (1) pendidikan nilai dan moral; (2) pendekatan lingkungan meluas; (3) pembelajaran aktif; (4) pemecahan masalah; (5) pendekatan kontekstual; (6) pembelajaran terpadu; (7) pembelajaran kelompok (8) praktik belajar kewarganegaraan; (9) pemberian keteladanan; dan (10) penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah yang berkarakter sesuai dengan nilai dan moral Pancasila.

Model pembelajaran dikembangkan dengan paradigma proses membangun pengetahuan melalui berbagai penalaran induktif dan/atau deduktif (problem-based learning, inquiry/discovery learning) dalam bingkai membangun pengetahuan melalui transformasi-building knowledge through transformation of experiences (Kolb:1986). PKn dengan paradigma baru dikatakan sebagai PKn yang bermutu 25 Winataputra and Sapriya, 1.5. karena memiliki

pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) yang berbasis pada keilmuan yang jelas dan relevan bagi masyarakat demokratis, memiliki keterampilan kewarganegaraan (civic skills), dan karakter kewarganegaraan (civic dispositions) yang mampu mengembangkan pembangunan karakter bangsa, pemberdayaan warga negara dan masyarakat kewargaan.

PKn yang bermutu inilah merupakan jati diri PKn yang mengacu pada tiga komponen seperti yang telah disebutkan sebelumnya. PKn di sekolah tidak hanya memberikan kemampuan untuk menghafal dan bukan untuk berpikir secara aktif sehingga hasilnya kurang bermakna (Muchtari Buchori, 2003 dalam Kompas sebagaimana dikutip oleh Cholisin).<sup>26</sup> Sapriya dan Winataputra (2007) menguraikan tugas PKn di MI/SD dengan paradigma barunya mengembangkan pendidikan demokrasi yang mengemban tiga fungsi pokok, yakni mengembangkan kecerdasan warga negara (civic intelligence), membina tanggung jawab warga negara (civic responsibility) dan mendorong partisipasi warga negara (civic participation). Dengan memahami dan menguasai materi ini diharapkan Anda akan tercerahkan dan dapat mengatasi kesulitan dalam menguasai materi dan membelajarkan PKn yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang. Agar semua harapan di atas dapat terwujud maka di dalam modul ini disajikan pembahasan dan latihan dengan butir uraian sebagai berikut:

1. Karakteristik warga negara yang demokratis.

Suryadi dan Somardi (1999) mengemukakan bahwa untuk mengkonsepsikan kembali pendidikan kewarganegaraan dengan paradigmanya yang baru, konsep negara dapat didekati dari sudut pandang sistem. Negara adalah suatu bentuk khusus dari tata kehidupan sosial yang dibangun dari sejumlah komponen dasar di dalam suatu sistem yang integral. Komponen-komponen dasar sistem tata kehidupan bernegara terdiri dari sistem personal, sistem kelembagaan, sistem normatif, sistem kewilayahan, dan sistem ideologis sebagai faktor integratif bagi seluruh komponen. Pengertian warga negara secara umum adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat lahir, dan sebagainya, yang memiliki kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu. (Kamus Besar bahasa Indonesia, 1994). Lima sistem tata kehidupan bernegara ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Pertama, sistem personal adalah suatu sistem yang merujuk pada orang-orang yang menjadi subjek dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, yang terdiri atas pemerintah dan 'yang diperintah'. Kedua jenis subjek ini yaitu pemerintah dan yang diperintah pada dasarnya memiliki atribut yang sama, yaitu sebagai warga negara, namun dalam fungsinya yang berlainan.

Kedua, sistem kelembagaan menunjuk kepada lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan menurut Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman terhadap lembaga-lembaga negara dan pemerintahan ini merupakan prasyarat dasar bagi warga negara untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan. Susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing lembaga, proses dan mekanisme perekrutan para pejabat dari masing-masing lembaga, serta aspek-aspek lainnya, perlu dipahami oleh setiap warga negara agar partisipasinya dalam kehidupan bernegara dapat ditingkatkan.

Ketiga, sistem normatif adalah sistem hukum dan perundang-undangan yang mengatur tata hubungan negara dan warga negara. Pemahaman terhadap sistem hukum dan perundang-undangan yang berlaku, merupakan prasyarat bagi partisipasi warga negara secara nalar dan penuh tanggung jawab.

Keempat, sistem kewilayahan menunjuk kepada seluruh wilayah teritorial yang termasuk ke dalam yurisdiksi negara Indonesia. Kelima, sistem ideologis merujuk kepada ide-ide dasar penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena sifatnya sebagai faktor integratif maka sistem ideologi ini hendaknya memayungi seluruh komponen sistem lainnya.

Komponen penting dalam pendidikan kewarganegaraan adalah komponen keterampilan bermasyarakat. Agar warga negara dapat menjalankan hak-hak dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat yang berpemerintahan sendiri, mereka bukan hanya perlu memiliki pengetahuan berkenaan dengan materi pokok di atas, mereka perlu pula untuk memiliki keterampilan-keterampilan intelektual dan partisipasi yang relevan. Keterampilan intelektual dalam mata pelajaran PKN tidak terpisahkan dari materinya.

Keterampilan intelektual yang penting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif, dan bertanggung jawab, antara lain keterampilan berpikir kritis, yang meliputi keterampilan mengidentifikasi dan mendeskripsikan; menjelaskan dan menganalisis; mengevaluasi, menentukan dan mempertahankan sikap atau pendapat berkenaan dengan persoalan-persoalan publik. Pendidikan kewarganegaraan yang baik memberi bekal kemampuan kepada warga negara untuk mengidentifikasi atau memberi makna dengan berbagai simbol fisik, seperti bendera, monumen nasional atau peristiwa - peristiwa politik dan kemasyarakatan, dan berbagai simbol non-fisik, seperti gagasan - gagasan atau konsep-konsep termasuk patriotisme, hak-hak mayoritas dan minoritas, masyarakat madani, dan paham konstitusi.

## 2. Model pembelajaran PKn untuk warga negara yang demokratis

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memegang peranan yang sangat strategis dalam mempersiapkan dan membina warga negara dengan kualitas, seperti tersebut di atas. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab itu pun ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat serta perbaikan masyarakat. Menimbang dasar pikiran dan tujuan PKn di atas, selayaknya pembelajaran PKn dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektivitas dalam berpartisipasi.

Oleh karena itu, ada dua hal yang perlu mendapat perhatian Anda sebagai guru atau calon guru dalam mempersiapkan pembelajaran PKn di kelas, yakni bekal pengetahuan materi pembelajaran dan metode atau pendekatan pembelajaran. Hal terakhir ini merupakan titik yang masih lemah untuk mengantarkan para peserta didik menjadi warga negara yang demokratis.

Pembelajaran partisipatif yang berbasis portofolio (Portfolio-based learning) merupakan alternatif utama guna mencapai tujuan PKn tersebut. Menyadari betapa pentingnya proses pembudayaan demokrasi dan pemberdayaan peserta didik sebagai warga negara demokratis sepanjang hayat, perlu diberi suasana pemberian keteladanan (*ing ngarsa sung tulada*), pembangunan kemauan (*ing madya mangun karsa*) dan pengembangan kreativitas peserta didik (*tut wuri handayani*) dalam proses pembelajaran PKn.

Oleh karena itu, sekolah dasar sebagai satuan pendidikan yang dikelola dengan konsep Manajemen berbasis Sekolah (MBS) dengan kewenangan mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) perlu dikembangkan sebagai pusat pengembangan wawasan, sikap, dan keterampilan hidup dan berkehidupan yang demokratis untuk membangun kehidupan demokrasi. Pendidikan persekolahan seyogianya dikembangkan sebagai wahana sosial kultural untuk membangun kehidupan yang demokratis.

Hal ini dapat diartikan bahwa sekolah harus menjadi wahana pendidikan untuk mempersiapkan kewarganegaraan yang demokratis melalui pengembangan kecerdasan

spiritual, rasional, emosional, dan sosial warga negara baik sebagai aktor sosial maupun sebagai pemimpin/khalifah pada hari ini dan hari esok. Karakter utama warga negara yang cerdas dan baik adalah dimilikinya komitmen untuk secara ajek mau dan mampu memelihara, dan mengembangkan cita-cita dan nilai demokrasi sesuai perkembangan jaman, dan secara efektif dan langgeng menangani dan mengelola krisis yang selalu muncul untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia sebagai bagian integral dari masyarakat global yang damai dan sejahtera.

## **B. Perbandingan Paradigma Baru Pembelajaran PKn SD dengan Paradigma Lama**

Pendidikan Pancasila dan UUD 1945 dicakup dalam pengetahuan PKn yang didalamnya menyangkut semua aspek dalam kehidupan bernegara menciptakan manusia berkarakter dalam dinamika kehidupan, serta mewujudkan nilai dalam kehidupan sehari-hari (Buchori et al., 2017; Juneman et al., 2012). Dalam pembelajaran PKn ada empat pembahasan yaitu konsep nilai, moral dan norma. Nilai adalah suatu kualitas yang melekat yang ada didalam diri manusia dalam aspek kehidupan sebagai suatu aspek yang berharga serta bermanfaat (Mediatati & Suryaningsih, 2017; Sakaningsih et al., 2014). Moral merupakan perilaku yang dilakukan individu yang tolak ukurnya kebaiakan didalam kehidupan sehari-hari (Safitri et al., 2019; Winther-Lindqvist, 2020). Pendidikan Pancasila dan UUD 1945 dicakup dalam pengetahuan PKn yang didalamnya menyangkut semua aspek dalam kehidupan bernegara menciptakan manusia berkarakter dalam dinamika kehidupan, serta mewujudkan nilai dalam kehidupan sehari-hari (Buchori et al., 2017; Juneman et al., 2012).

Tugas PKn dengan paradigma barunya yaitu mengembangkan pendidikan demokrasi mengemban tiga fungsi pokok, yakni mengembangkan kecerdasan warganegara (civic knowledge), membina keterampilan warga negara (civic skill) dan membentuk watak warga negara (civic disposition). Kecerdasan warganegara yang dikembangkan untuk membentuk warga negara yang baik bukan hanya dalam dimensi rasional, melainkan juga dalam dimensi spiritual, emosional, dan sosial sehingga paradigma baru PKn bercirikan multidimensional.

Nilai kepribadian nasionalis adalah cara berpikir, berperilaku dan bersikap yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan rasa hormat sangat mementingkan bahasa tubuh, masyarakat, budaya, ekonomi dan politik nasional serta mendahulukan kepentingan nasional (Hasan, 2012; Rosala & Budiman, 2020). Norma merupakan petunjuk yang ada didalam kehidupan bernegara misalnya norma agama, hukum kesopanan, dan kesusilaan. Perubahan paradigme ini menjadi instrumen yang baik bagi



pemerintah untuk terus melakukan berbagai terobosan guna mendukung tujuan pendidikan ini.

Pembelajaran PKn yang berubah juga ikut mempengaruhi pembentukan karakter masyarakat. Melalui pembelajaran nilai-nilai demokrasi, saat ini paradigma PKn mengalami perubahan yang sangat fundamental. Pendidikan kewarganegaraan yang belakangan dikembangkan dikenal dengan pendidikan kewarganegaraan paradigma baru, sangat berbeda dengan pendidikan kewarganegaraan paradigma lama. Pendidikan kewarganegaraan paradigma baru mengalami perubahan dalam beberapa aspeknya; visi, misi, Dalam paradigma lama, PKn mewujud sebagai indoktrinasi kepentingan penguasa dan standar- standar moral secara monologis.

Dengan paradigma baru tersebut, pendidikan kewarganegaraan dapat mengambil peran dalam rangka konstruksi, rekonstruksi, maupun resolusi persoalan-persoalan yang muncul di berbagai sektor kehidupan Bangsa Indonesia, melalui pembelajaran pengetahuan kewarganegaraan, nilai-nilai kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan pada dasarnya pendidikan nilai merupakan salah satu komponen epistemologis pendidikan kewarganegaraan. Daniel Dakhidae (2001) mempertegas bahwa salah satu peran pendidikan kewarganegaraan adalah memberikan panduan penanaman nilai-nilai ideologis yang dianggap tinggi oleh suatu bangsa bagi generasi penerusnya, menjadikan manusia *homo novi ordinis*, yaitu manusia yang telah mencapai kesempurnaan hidup, berjiwa besar, dan berkebaikan sejati.

Paradigma baru PKn antara lain memiliki struktur organisasi keilmuan yang jelas yakni berbasis pada ilmu politik, hukum dan filsafat moral /filsafat Pancasila dan memiliki visi yang kuat *nation and character building, citizenempowerment* (pemberdayaan warga negara), yang mampu mengembangkan *civil society* (masyarakat kewargaan). Paradigma baru ini merupakan upaya untuk menggantikan paradigma lama PKn (PPKn), yang antara lain bercirikan struktur keilmuan yang tidak jelas, materi disesuaikan dengan kepentingan politik rezim (hegemoni penguasa), memiliki visi untuk memperkuat *state building* (negara otoriter birokratis; kooptasi negara) yang bermuara pada posisi warga negara sebagai kaula atau obyek yang sangat lemah ketika berhadapan dengan penguasa. Akibat dari kondisi ini, PKn semakin sulit untuk mengembangkan karakter warga negara yang demokratis, sehingga menjadi lahan subur bagi berkembangnya otoriterisme.



## **METODE**

Naskah ini bertujuan untuk mengetahui paaradigma Metode yang digunakan dalam kajian ini ialah menggunakan metode kajian literatur yang bersumber dari buku, jurnal, internet penelitian tindakan dimana peneliti yang juga sebagai dosen dapat terlibat secara langsung dalam meningkatkan kualitas perkuliahan yang tercermin dalam peningkatan pemahaman mahasiswa. Senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Creswell (2012:592) bahwa tujuan dari penelitian tindakan adalah untuk meningkatkan praktek pendidikan dimana peneliti mempelajari masalah mereka sendiri atau masalah di lingkungan pendidikan. Selanjutnya peneliti terlibat dalam refleksi tentang masalah, mengumpulkan dan menganalisis data, dan menerapkan perubahan atau sebuah rencana tindakan berdasarkan hasil refleksi. Penelitian dilakukan dalam 7 (tujuh) siklus yang terdiri dari brainstorming, proses pelaksanaan metode portofolio, dan refleksi akhir.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini merupakan bagian utama artikel hasil penelitian dan biasanya merupakan bagian terpanjang dari suatu artikel. Hasil penelitian yang disajikan dalam bagian ini adalah hasil "bersih". Proses analisis data seperti perhitungan statistik dan proses pengujian hipotesis tidak perlu disajikan. Hanya hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis saja yang perlu dilaporkan. Tabel dan grafik dapat digunakan untuk memperjelas penyajian hasil penelitian secara verbal. Tabel dan grafik harus diberi komentar atau dibahas.

Pembahasan dalam artikel bertujuan untuk: (1) menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian; (2) menunjukkan bagaimana temuan-temuan itu diperoleh; (3) menginterpretasi/menafsirkan temuan-temuan; (4) mengaitkan hasil temuan penelitian dengan struktur pengetahuan yang telah mapan; dan (5) memunculkan teori-teori baru atau modifikasi teori yang telah ada. Berikut ini adalah cara menuliskan format pengorganisasian tersebut, yang di dalamnya menunjukkan cara penulisan hal-hal khusus yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah artikel.

## **KESIMPULAN**

Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan Indonesia adalah pendidikan kewarganegaraan yang demokratis yang mengandalkan demokrasi sebagai titik fokus. Namun, demokrasi yang berkembang di Indonesia tidak seperti itu demokrasi universal dengan nuansa sekuler, tetapi demokrasi yang harus bertahan berpegang teguh pada Tiang Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini Sanusi (1998:4-12) mengusulkan sepuluh pilar demokrasi konstitusional Indonesia Demokrasi Indonesia, yang meliputi:demokrasi yang percaya pada satu Tuhan Yang Maha Esa,demokrasi yang membela hak asasi manusia, demokrasi yang berdaulat.

Menyadari betapa pentingnya proses pembudayaan demokrasi dan pemberdayaan peserta didik sebagai warga negara demokratis sepanjang hayat, perlu diberi pemberian keteladanan, pembangunan kemauan dan pengembangan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran PKn. Sehingga tujuan dari pendidikan kewarganegaraan dapat tercapai. Sebagai mahasiswa, kita harus mampu memimpin perubahan sosial menjadi lebih baik. Mengingat keberagaman yang ada di masyarakat, mahasiswa harus mampu menghidupkan keberagaman itu dalam masyarakat pemersatu. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan sangat penting bagi siswa untuk mengikuti perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Alangkah baiknya jika pendidikan kewarganegaraan ini dijadikan acuan bagi para siswa untuk melakukan perubahan sosial.

Pendidikan dianggap pendidikan dasar karena meletakkan dasar untuk pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan individu dan masyarakat untuk mengembangkan dan mencapai potensi penuh mereka (Afandi et al, 2022; Rachmadtullah et al, 2022, Rasmitadila, Humaira, & Rachmadtullah, 2022; Rasmitadila et al, 2022a Rasmitadila et al, 2022b). Perhatian khusus diberikan pada pengembangan dan pemajuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan(Rasmitadila et al, 2022c-e; Rachmadtullah et al, 2022b). Pendidikan yang berkualitas juga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini mendorong semua bidang kehidupan untuk memberikan perhatian khusus pada pengembangan pendidikan (Syaodih & Samsudin, 2021).

## UCAPAN TERIMAKASIH

Jika perlu berterima kasih kepada pihak tertentu, misalnya sponsor penelitian, nyatakan dengan jelas dan singkat, hindari pernyataan terima kasih yang berbunga-bunga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdin, Maslan. 2020. "Kedudukan Dan Peran Warga Negara Dalam Masyarakat Multikultural." *Jurnal Pattimura Civic* 1(1):1-9.
- Afandi, M., Rachmadtullah, R., & Syamsi, A. (2022). The Impact of the Multi-Representational Discourse Learning Model and Student Involvement in Applying Multiculturalism Values. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 6(2).
- Ap, Semnas. 2014. "Semnas AP3KnI, Tahun 2014 Udin.S.Winataputra." 1-12.
- AR, Muchson. 2004. "Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Baru Dan Implementasinya Datatii Kurikuluiii Berbasis Kotpetensi." *Jurnal Civic* 1(1): 29-41.
- Bagus Aditya Hutomo1), Ernia Duwi Saputri2), Anis Umi Khoirotun Nisa. 2021. "Inovasi Pembelajaran Ppkn Pada Era 4.0." *Jurnal Pendidikan Edutama* (2548-281): 1-11. <https://ejurnal.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php...>
- Cholisin. 2019. "Pengembangan Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Dalam Praktek Pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689-99.
- DigCurV. 2013. "A Curriculum Framework for Digital Curation." *DigCurV website*: 19-20. <http://www.digcurv.gla.ac.uk/>.
- Dinata, M. Ruhly Kesuma, Syafruddin, and Sinta Septiana. 2021. "Konsep Dasar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan." *Jurnal PG-PAUD STKIP Pahlawan Tuanku Tambusai* 4(1):1-23.
- Kamarudin, Kamarudin. 2021. "Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pelajaran PPKn Dengan Menerapkan Model Paradigma Pedagogi Reflektif Di Sekolah Dasar." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3(5):3371-75.
- Kawuryan, Sekar Purbarini. 2009. "Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Sekolah Dasar." : 1-33. *Kewarganegaraan, Pendidikan, and Menuju Indonesia*. 2000. "PoHtik Dari." (4):238-45.
- Online, Arsip Kuliah. 2011. "Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan."
- Rachmadtullah, R., Pramujiono, A., Setiawan, B., & Srinarwati, D. R. (2022). Teacher's Perception of the Integration of Science Technology Society (STS) into Learning at Elementary School. *KnE Social Sciences*, 202-209.
- Rachmadtullah, R., Setiawan, B., Wasesa, A. J. A., & Wicaksono, J. W. (2022). Monograf

Pembelajaran Interaktif dengan Metaverse. CV. EUREKA MEDIA AKSARA.

- Rasmitadila, R., Humaira, M. A., & Rachmadtullah, R. (2022). Student teachers' perceptions of the collaborative relationships between universities and inclusive elementary schools in Indonesia. *F1000Research*, 10, 1289.
- Rasmitadila, R., Humaira, M. A., Rachmadtullah, R., Samsudin, A., & Nurtanto, M. (2022). Exploring Lecturers' Perspectives on Inclusive Elementary School Mentoring Programs based on University-School Collaborative Partnerships in Indonesia. *Journal of Education and e-Learning Research*, 9(4), 233-239.
- Rasmitadila, R., Megan Asri, H., & Reza, R. (2022). Teachers' Perceptions of the Role of Universities in Mentoring Programs for Inclusive Elementary Schools: A Case Study in Indonesia. *Journal of Education and e-Learning Research*, 8(3), 333-339.
- Rasmitadila, R., Megan Asri, H., Reza, R., Achmad, S., & Muhammad, N. Exploring Lecturers's Perspective on Inclusive Elementary School Mentoring Program Based on University Collaborative Partnerships in Indonesia. *Journal of Education and e-Learning Research*, 9(4), 233-239.
- Rasmitadila, R., Megan Asri, H., Reza, R., Lala Laila, Z., Euis Mauna, M., & Siti, A. (2022). Adjustment of Inclusive Education Courses with Inclusive Elementary Schools Needs: Part of the University School Collaborative Partnership.
- Rasmitadila, R., Rachmadtullah, R., Samsudin, A., Nurtanto, M., & Jauhari, M. N. (2023). Limited face-to-face learning on students in inclusive classrooms during the Covid-19 pandemic: Perceptions of elementary school teachers in Indonesia. *Cogent Education*, 10(1), 2213612.
- Retnasari, L, and Z H Rahman. 2020. "MODUL P3PPKn SEKOLAH DASAR (MATERI KONSEP DASAR PPKn MI/SD) UNTUK MAHASISWA PGSD UAD." *Eprints.Uad.Ac.Id*. [http://eprints.uad.ac.id/33046/1/MODUL\\_MATERI\\_KONSEP\\_DASAR\\_PPKn\\_sd.pdf](http://eprints.uad.ac.id/33046/1/MODUL_MATERI_KONSEP_DASAR_PPKn_sd.pdf).
- Sawitri, Dyah, and Endang Mastuti Rahayu. 2018. "Modul PKT. 08 - Penilaian Hasil Belajar." 1-31.
- Setiadi, Hari. 2016. "Pelaksanaan Penilaian Pada Kurikulum 2013." *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 20(2):166-78. doi: 10.21831/pep.v20i2.7173.
- Setiawan, Denny. 2019. "Reaktualisasi Konsep Kewarganegaraan Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional* 15-24.
- Syaodih, E., & Samsudin, A. (2021). Parent's perspective on early childhood learning needs during covid-19 using nvivo 12 software: A case study in indonesia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 42(4), 924-931.
- Uaksena, 2011. *Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Tersedia dilaman* <http://uaksena.wordpress.com/2011/07/20/paradigma-pendidikan-kewarganegaran-pendidikan-demokrasi-di-indonesia/>.
- Ulfah, N. (2018). *Pengembangan Kompetensi Profesional Calon Guru PKn MI: Pemahaman*

tentang Paradigma Baru PKn. *Ibriez : Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains*, 3(1), 49–64. <https://doi.org/10.21154/ibriez.v3i1.44>

Veronica Siregar, Veni, Muqowim Muqowim, and Jonata Jonata. 2021. "Pembelajaran PKN Dengan Paradigma Integratif Guna Pembentukan Karakter Siswa." *MIMBAR PGSD Undiksha* 9(2):313. doi: 10.23887/jjpgsd.v9i2.35232.

Wahyuni, I. dkk. 2022. "Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar Efektifitas Model Mind Mapping Dalam Melse (Elementary School Education Journal)." *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar* 6(Pendidikan):66–351.

Winataputra, U. S. & Sapriya. 2011. "Paradigm Baru Pkn Di SD/Mi." 1–40.